PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI DESA SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI**¹Nandio Nurrahman****²Wahju Gunawan****³Jajang Sutisna****¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjajaran****²Departemen Sosiologi, Universitas Padjajaran****³Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran**Email Korespondensi : nandio18001@mail.unpad.ac.id**ABSTRACT**

The change in the status of a village to a sub-district is an effort from the government to achieve effectiveness and efficiency in providing services to the community. This change in village status is the authority of a village as a legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of the community to change the authority of village status to become a village based on local origins and customs. One of the villages that has applied for a change of status to become a sub-district is Setia Asih Village, Setia Asih Village located in West Java Province in Bekasi Regency. In the event that this status change is regulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2017 concerning Village Arrangements. The purpose of this study is to identify and describe the procedure for implementing changes in the status of a village to a sub-district. The research method is using qualitative methods with data collection techniques literature study, observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the procedure for implementing the change in the status of a village to a sub-district took quite a long time since the proposal was first proposed. However, in the process of changing this status, it is still not optimal and there are several things that need to be maximized, one of which is less than optimal in administration and management. lack of coordination between the Village Government, District Government, Regency Government and Provincial Government. In the process of changing the status of a village to a sub-district, they should coordinate with each other so that when there are obstacles they will be resolved quickly and not hamper them for too long.

Keywords: Implementation Procedures for Changing the Status of a Village to a Village.

ABSTRAK

Perubahan status Desa menjadi kelurahan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Perubahan status desa ini merupakan kewenangan suatu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mertubah kewenangan status desa menjadi kelurahan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Salah Satu desa yang telah mengajukan untuk perubahan status menjadi kelurahan ialah Desa Setia Asih, Desa Setia Asih terletak di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi. Dalam hal perubahan status ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan prosedur

pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan ini menghabiskan waktu yang cukup lama sejak adanya usulan pertama kali, Namun dalam proses perubahan status ini masih kurang optimal dan ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, salah satunya yaitu kurang maksimal dalam pengurusan administrasinya dan kurangnya berkordinasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Seharusnya dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan ini harus saling berkordinasi sehingga ketika ada hambatan akan teratasi dengan cepat dan tidak menghambat terlalu lama.

Kata Kunci : Prosedur Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

PENDAHULUAN

Perubahan status Desa menjadi kelurahan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Perubahan status desa ini merupakan kewenangan suatu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mertubah kewenangan status desa menjadi kelurahan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Jika dilihat dari aspek regulasinya perubahan status ini telah diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Perubahan status ini dapat dilakukan apabila desa tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 46 Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang menyatakan perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau

- 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan.
- i. Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Berdasarkan pasal 47 dan pasal 48 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, prosedur yang harus dilakukan yang menjadi tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
2. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
3. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
4. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
5. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
6. Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
7. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
8. Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Dilanjut di pasal 48 menyebutkan :

1. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Salah Satu desa yang telah mengajukan untuk perubahan status menjadi kelurahan ialah Desa Setia Asih, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan ialah banyaknya masyarakat desa maupun luar yang mengajukan untuk menjadi Kepala Desa dengan memiliki kepentingan tersendiri. Hal yang dilakukan oleh para pengaju tersebut meresahkan sehingga terjadi perpecahan di antara masyarakat Desa Setia Asih. Selain itu, perubahan status desa Setiasih menjadi kelurahan didukung oleh kondisi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang perlahan-lahan berubah menjadi kawasan industri dan banyaknya kawasan perumahan dan pemukiman.

Desa Setia Asih mulai mengusulkan pertama kali diusulkan pada tahun 2005 berdasarkan surat keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/kep.359.A-Pemdes/2005 Tentang Inventarisasi Dan Pemilihan Atas Aset- Aset Desa yang diusulkan menjadi Kelurahan, dan Nomor 141/kep.359/B.

Pemdes/ 2005 Tentang Penetapan Profil Status Desa Menjadi Kelurahan. Kemudian pada tahun 2006 lalu, Kecamatan Tarumajaya yang mendapat dukungan masyarakat Desa Setia Asih, untuk mengeluarkan surat edaran terkait perubahan status desa menjadi Kelurahan, namun usulan ini kembali mengalami penundaan. Sampai dengan tahun 2018 pelaksanaan perubahan status desa ini baru terelaisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Menurut Sugiyono (2017:2) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis mengenai penelitian yang dilakukan. Sehingga untuk mendeskripsikan data dan informasi perlu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2016:3) bahwa metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian dengan metode kualitatif yang akan memberikan hasil data deskriptif, berupa gambaran dalam penyajian laporan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Laporan tersebut berisi kutipan-kutipan berasal dari wawancara, foto, dokumen yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan terkait penelitian prosedur pelaksanaan perubahan status desa menjadi

kelurahan di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi agar mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengolah data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta penelitian ini dilengkapi dengan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI DESA SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan suatu upaya yang difasilitasi oleh pemerintah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam perubahan status desa menjadi kelurahan ini terdapat prosedur dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh desa tersebut. Selain itu perubahan status desa menjadi kelurahan ini telah diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Salah Satu desa yang telah mengajukan untuk perubahan status menjadi kelurahan ialah Desa Setia Asih, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan ialah banyaknya masyarakat desa maupun luar yang mengajukan untuk menjadi Kepala Desa dengan memiliki kepentingan tersendiri. Hal yang dilakukan oleh para pengaju tersebut meresahkan sehingga terjadi perpecahan di antara masyarakat Desa Setia

Asih. Selain itu, perubahan status desa Setia Asih menjadi kelurahan didukung oleh kondisi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang perlahan-lahan berubah menjadi kawasan industri dan banyaknya kawasan perumahan dan pemukiman. Faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan status desa menjadi kelurahan karena jumlah masyarakat yang semakin meningkat dengan jumlah penduduk sebanyak 47.548 jiwa, sehingga penduduk Desa Setia Asih semakin padat melebihi kapasitas di desa tersebut. Selanjutnya prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terseleggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Setia Asih yang saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Lalu terdapat juga prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih, dan telepon walaupun rumah dinas Kepala Desa dan rumah dinas perangkat desa tidak ada dan sebagainya. Perubahan-perubahan kondisi tersebut, mendorong Desa Setia Asih mengajukan untuk merubah statusnya menjadi kelurahan.

Adapun potensi ekonomi Desa Setia Asih ini yang sudah berkembang dengan bermacam-macam usaha jasa dan jumlah produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian yang dimana masyarakat Desa Setia Asih ini berprofesi sebagai wirausaha di berbagai sektor ekonomi dan pegawai negeri maupun swasta dan hanya beberapa orang yang profesinya bertumpu pada sektor pertanian. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan status dari masyarakat agraris. Kondisi masyarakat Desa Setia Asih yang heterogen dan lebih banyak yang berasal dari luar Desa Setia Asih yang dikit demi sedikit merubah gaya hidup disana.

Kualitas dan kuantitas pelayanan Desa Setia Asih harus sudah meningkat, hal ini disebabkan karena banyaknya tuntutan masyarakat Desa Setia Asih untuk dapat dilayani dalam pengurusan beberapa dokumen penting seperti dokumen kependudukan, izin usaha dan pelayanan lainnya yang semakin banyak dari waktu ke waktu dan menuntut layanan birokrasi yang cepat dan sistematis.

Desa Setia Asih mulai mengusulkan pertama kali diusulkan pada tahun 2005 berdasarkan surat keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/kep.359.A-Pemdes/2005 Tentang Inventarisasi Dan Pemilihan Atas Aset- Aset Desa yang diusulkan menjadi Kelurahan, dan Nomor 141/kep.359/B. Pemdes/ 2005 Tentang Penetapan Profil Status Desa Menjadi Kelurahan. Kemudian pada tahun 2006 lalu, Kecamatan Tarumajaya yang mendapat dukungan masyarakat Desa Setia Asih, mengeluarkan surat edaran terkait perubahan status desa menjadi Kelurahan, namun usulan ini kembali mengalami penundaan. Pada tahun 2008 usulan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih ini sempat ada penolakan dari masyarakat dan para calon Kepala Desa dikarenakan akan adanya Pilkades. Dilanjut pada tahun 2013 telah dilakukan musyawarah desa yang membahas perubahan status Desa Setia Asih menjadi kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menjanjikan akan mengawal proses perubahan status tersebut. Namun upaya tersebut tidak berlanjut yang tidak diketahui apa penyebabnya. Kemudian dilanjut pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melakukan langkah-langkah untuk mengupayakan perubahan status Desa Setia Asih menjadi kelurahan dan menyelenggarakan musyawarah desa dengan di hadiri oleh masyarakat desa dan 100% di setuju oleh peserta yang hadir dimusyawarah desa tersebut. Dari tahun 2018 hingga saat ini

Desa Setia Asih sedang mengalami proses perubahan status, sehingga pada tahun 2019 dipimpin oleh PJ Kepala Desa dan pada tahun 2020 Desa Setia Asih tidak di ikut sertakan dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES).

Jika dilihat dari segi persyaratan Desa Setia Asih sudah sangat memenuhi prasyarat untuk merubah statusnya menjadi kelurahan. Yang diantaranya :

1. Luas wilayah Desa Setia Asih sebesar 692 Ha, yang dimana luas wilayah saat ini tidak akan berubah sama sekali ketika nanti telah berubah menjadi kelurahan.
2. Jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 menyatakan batas minimal penduduk desa ialah 6000 jiwa atau 1200 kartu keluarga. Sehingga hal ini meyakini bahwa Desa Setia Asih sudah layak berubah menjadi kelurahan dikarenakan penduduk jumlah penduduk Desa Setia Asih saat ini sebanyak 47.548 jiwa.
3. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Setia Asih sudah terselenggara seperti pemerintahan kelurahan, dengan adanya gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Setia Asih yang saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Lalu terdapat juga prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih, dan internet. Meskipun masih ada kekurangan dalam sarana dan prasarana di kantor Pemerintahan Desa Setia Asih seperti telepon yang sulit di hubungi, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu berat di saat proses perubahan status. Karena mungkin fasilitas tersebut akan di perbaiki ketika sudah menjadi kelurahan.
4. Potensi ekonomi masyarakat Desa Setia Asih saat ini Sebagian besar berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, wirausaha dan hanya sebagian orang yang profesinya bertumpu pada sektor pertanian dikarenakan sudah sedikitnya lahan pertanian. Sejak tahun 2016 jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 2.567 jiwa, sedangkan yang bertumpu pada sektor pertanian sebanyak 147 jiwa. Hal ini menyatakan bahwa Desa Setia Asih sudah layak berubah statusnya dikarenakan telah hilangnya salah satu ciri pedesaan yaitu kesamaan dalam bidang mata pencaharian.
5. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Setia Asih sudah berubah dengan masyarakat yang heterogen dan lebih banyak yang berasal dari luar Desa Setia Asih. Menurut hasil wawancara jumlah penduduk pendatang sebanyak 60 % sedangkan penduduk asli hanya sekitar 40 %. Sehingga sudah banyaknya keanekaragaman budaya dari luar daerah. Rata-rata masyarakat pendatang dari luar tersebut hanya untuk tinggal di Desa Setia Asih beda halnya dalam pekerjaan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Setia Asih seperti, Jakarta Utara, Bekasi, dan Kota Bekasi.
6. Desa Setia Asih sudah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan, karena banyaknya tuntutan masyarakat Desa Setia Asih untuk dapat dilayani dalam pengurusan beberapa dokumen penting seperti dokumen kependudukan, izin usaha dan pelayanan lainnya yang semakin banyak dari waktu ke waktu dan menuntut layanan birokrasi yang cepat dan sistematis. Kualitas pelayanan disana sudah meyerupai seperti kelurahan sehingga demi lebih mengefektivitas kan kuantitas dan kualitas pelayanan Desa Setia Asih harus

secepatnya berubah statusnya menjadi kelurahan.

7. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi Desa Setia Asih sudah cukup baik, yang dimana Desa Setia Asih itu berdekatan dengan Jakarta Utara dan Kota Bekasi sehingga akses transportasi antar wilayah sudah cukup memadai seperti adanya jalan raya, sudah adanya transportasi umum. Kondisi infrastruktur Desa Setia Asih sudah bercirikan perkotaan yang dimana Desa Setia Asih ini di penuhi perumahan dan kawasan industry, selain itu sudah terdapat minimarket dan toko-toko lainnya. Selanjutnya pesawahan yang berada Desa Setia Asih hanya sebesar 2,5 % dari total luas wilayah.
8. Usia Desa Setia Asih saat ini sudah lebih dari 5 tahun dari tahun pembentukan.

Dengan begitu Desa Setia Asih sudah memenuhi syarat untuk memenuhi untuk merubah statusnya menjadi kelurahan, selain itu adapun tahapan yang telah dilakukan oleh Desa Setia Asih dalam prosedur perubahan statusnya ini yaitu :

1. Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa Setia Asih bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa Setia Asih.
2. Prakarsa tersebut dibahas dan di sepakati dalam musyawarah desa yang hadir pada saat itu.
3. Pemerintah Desa Setia Asih memfasilistasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status desa menjadi kelurahan.
4. Kemudian terjadinya musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut.

5. Hasil musyawarah desa dituangkan dan ditetapkan ke dalam bentuk berita acara musyawarah desa dengan notulen musyawarah desa. Adapun hasil dari musyawarah desa tersebut Desa Setia Asih setuju dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan.
6. Hasil dari keputusan musyawarah desa kemudian disampaikan oleh Kepala Desa Setia Asih kepada Bupati Kabupaten Bekasi sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
7. Bupati Kabupaten Bekasi menerima laporan dari Kepala Desa lalu membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
8. Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut. Kajian dan verifikasi tersebut berlaku mutatis dan muntandis sesuai dalam Pasal 20 dan 22 di Permendagri No 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.
9. Bupati Kabupaten Bekasi menyetujui usulan perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan Setia Asih.
10. Bupati Kabupaten Bekasi menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD.
11. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten bersama DPRD dan Bupati mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.
12. Bupati Kabupaten Bekasi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.
13. Biro Hukum Provinsi mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi kepada Bupati untuk di revisi.

14. Bupati merevisi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.
15. Biro Hukum Provinsi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi terkait usulan perubahan status desa menjadi kelurahan Di Desa Setia Asih Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memverifikasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih
17. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau kembali ke Desa Setia Asih untuk melihat keadaan kondisi desa.
18. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi usulan perubahan status dan menyepakati.
19. Pemerintah Provinsi mengeluarkan surat rekomendasi terkait pengeluaran kode kelurahan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Proses yang dilakukan Desa Setia Asih dalam merubah statusnya ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan juga mengalami beberapa faktor yang menghambat akan proses perubahan status ini seperti :

- a. Proses administrasi perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan.
- b. Penataan administrasi dan dokumen aset-aset milik Desa Setia Asih yang perlu disinergikan data yang ada di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- c. Proses pelayanan administrasi desa yang belum tertata dan tidak memiliki standar pelayanan.
- d. Kurangnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan desa.

Selain itu menurut salah satu sumber yang penulis wawancara menjelaskan:

“ Dalam proses perubahan status ini dari pihak desa sudah mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah dan Provinsi, bahkan dari pihak provinsi sudah mengunjungi Desa. Bahkan untuk prasyarat perubahan status ini Desa Setiasih sudah memenuhi prasyarat tersebut Perubahan status desa menjadi kelurahan ini baru terealisasi sejak 2018, yang dimana dari 2006 masyarakat sudah mengusulkan akan tetapi setelah 2006 itu tetap ada pilkades sampai dengan 2018 yang tidak diketahui apa alasannya, saat ini tahap proses perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan Setia Asih sudah ditahap Kemendagri untuk pengeluaran kode wilayah.“

Adapun menurut narasumber yang kedua menjelaskan bahwa pada tahun 2008 lalu usulan perubahan status desa menjadi kelurahan ditolak dikarenakan adanya pilkades sehingga masyarakat dan calon Kepala Desa menolak ,maka dari itu sebelum dilaksanakan pilkades Badan Permusyawaratan Desa bersama pemerintah desa mengadakan kesepakatan dengan para calon Kepala Desa dan masyarakat bahwa setelah proses perubahan status desa akan dilaksanakan setelah periode selanjutnya sehingga saat itu Badan Perwakilan Desa hanya bisa mengawasi tahapan pilkades. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi Desa Setia Asih saat proses perubahan status

desa yaitu sering bergantinya pejabat di DPMDDES sehingga hal tersebut menghambat proses perubahan status Desa Setia Asih.

Jika dilihat kendala dari Desa Setia Asih dalam menjalani proses perubahan status desa menjadi kelurahan tidaklah semudah apa yang di harapkan, dikarenakan adanya faktor yang menghambat proses perubahan status desa menjadi kelurahan dari segi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten bahkan dari masyarakatnya sendiri sehingga proses perubahan status Desa Setia Asih ini terealisasi pada tahun 2018.

Selain itu saat dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan, Desa Setia Asih harus mengikuti ketentuan peralihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi seperti :

- a. Sebelum diangkatnya lurah dan perangkat kelurahan, Desa Setia Asihh dipimpin oleh PJ. Kepala Desa diangkat sesuai Undang-Undang.
- b. Sebelum diangkatnya lurah dan perangkat daerah maka Perangkat Desa dan BPD masih tetap menjalankan tugas Pemerintahan Desa.
- c. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dokumen-dokumen yang dimiliki dan/atau akan dimohon oleh penduduk agar disesuaikan dengan status sebagai kelurahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

adapun ketentuan lain-lain ;

- a. Menginventarisi, memverifikasi kekayaan/aset Desa Setia Asih untuk dialihkan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Melaksanakan sosialisasi perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan Setia Asih.
- c. Melaksanakan persiapan peresmian dan pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- d. Melaksanakan upaya-upaya lain yang di perlukan dalam rangka kelancaran perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan Setia Asih.

Seperti yang di katakan oleh Gillin dan Gillin dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di masyarakat (2013 : 263). Dapat dilihat bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan ini berdampak besar terhadap perubahan sosial yang dimana berupa perubahan kondisi geografis yaitu sudah banyaknya perumahan dan kawasan industri dan sudah berkurangnya pesawahan disana. Adapun dari segi komposisi masyarakat Desa Setia Asih ini tidak akan adanya kembali perpecahan antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh Pilkades. Selain itu jika desa sudah menjadi kelurahan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan akan lebih meningkat seperti gotong royong ataupun kerja bakti dan membuat tali persaudaraan semakin erat. Adapun masyarakat Desa Setia Asih saat ini sudah tidak homogen melainkan sudah heterogen, ditambah masyarakat Desa Setia Asih ini sudah melebihi kapasitas penduduk dan juga masyarakat pendatang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat lokal.

Awalnya perubahan status desa menjadi kelurahan ini tidak selalu di pandang baik oleh sebagian masyarakat dan

memunculkan kekhawatiran Sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat khawatir dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan budaya tradisional akan pudar dikarenakan banyaknya masyarakat pendatang dari luar. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat pendatang justru banyak menggunakan budaya tradisional desa dalam melaksanakan kegiatan atau merayakan hari-hari besar. Hal ini membuat masyarakat asli Desa Setia Asih percaya dan menghilangkan kekhawatiran bahwa ketika berubah menjadi kelurahan budaya tradisional tidak akan pudar bahkan menghilang. Selain itu perubahan status Desa menjadi Kelurahan ini berdampak besar bagi Aparatur Desa disana karena ketika sudah berubah menjadi kelurahan Aparatur Desa akan digantikan oleh Aparatur Kelurahan yang notabenehnya adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil.

Analisis SWOT Sederhana dalam Prosedur Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjad Kelurahan Di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

Analisis *SWOT* merupakan suatu teknik dengan memberikan cara sederhana dalam menentukan sebuah strategi yang digunakan untuk mengevaluasi *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) pada suatu organisasi, unsur-unsur tersebut dapat berguna untuk memberikan cara sederhana dalam memperkirakan, merumuskan dan menentukan sebuah strategi.

Kekuatan (*strength*)

- Desa Setia Asih telah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan.

- Desa Setia Asih telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- Besarnya masyarakat pendatang dibandingkan masyarakat pribumi.
- Adanya perpecahan antar kelompok masyarakat yang di sebabkan oleh Pilkades.
- Kondisi Desa Setia Asih saat ini sudah tidak mencirikan lagi sebagai daerah pedesaan.

Kelemahan (*weakness*)

- Proses administrasi perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan.
- Penataan administrasi dan dokumen aset-aset milik Desa Setia Asih yang belum selaras dengan data yang ada di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Proses pelayanan administrasi desa yang belum tertata dan tidak memiliki standar pelayanan.
- Kurangnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan desa.

Peluang (*opportunity*)

- Tidak adanya perpecahan kembali antar kelompok masyarakat yang di sebabkan dengan adanya Pilkades
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai wirausaha perdagangan dan jasa

Ancaman (*threat*)

- Kekayaan desa akan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Strategi SO

- Mempercepat proses pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih.

Strategi ST

- Melalui dukungan penuh yang diberikan oleh masyarakat desa untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan aset desa yang telah di ambil alih dengan efektif dan efisien serta dapat menguntungkan bagi masyarakat desa.

Strategi WO

- Mempercepat penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan agar perubahan status desa menjadi kelurahan cepat terlaksana sehingga tidak adanya perpecahan masyarakat yang disebabkan adanya Pilkades.
- Pemerintah Kabupaten lebih bersinergi dengan Pemerintah Desa terkait proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan agar perubahan status Desa ini dapat cepat terlaksana, sehingga setelah menjadi kelurahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Strategi WT

- Meningkatkan penataan administrasi dan dokumen aset-aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar data tersebut selaras, sehingga dalam memanfaatkan kekayaan Desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dapat di kelola dengan efektif dan efisien serta menguntungkan masyarakat.

Upaya Alternatif Terhadap Prosedur Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam prosedur pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi lebih bergerak cepat dalam penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa Setia Asih menjadi Kelurahan, dikarenakan ketika Rancangan Peraturan Daerah tersebut selesai Bupati harus melakukan beberapa proses yang dimana proses itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan di khawatirkan akan adanya revisi terkait Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan memakan waktu yang lebih banyak.
- b. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus meningkatkan penataan administrasi dan dokumen aset-aset desa agar data tersebut selaras, sehingga dalam memanfaatkan kekayaan Desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dapat di kelola dengan efektif dan efisien serta menguntungkan masyarakat.
- c. Pemerintah Desa Setia Asih harus menyeleksi kembali Aparatur Desa dan menambah sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi.
- d. Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melakukan pengawalan yang lebih dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih ini. Sehingga ketika ada hambatan dapat diatasi dengan cepat

dan membuat proses perubahan status desa menjadi kelurahan ini berjalan optimal.

Berdasarkan solusi dan inovasi tersebut, pelaksanaan perubahan status desa menjadi Kelurahan di Desa Setia Asih dapat terlaksana dengan optimal, efektif, dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Prosedur Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
  - a. Prosedur Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dalam proses pelaksanaannya telah memenuhi prasyarat yang dan telah mengalami beberapa tahapan untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan. Namun selama proses perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala yang memperlambat proses perubahan tersebut.
  - b. Prosedur Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berdampak baik bagi Desa Setia Asih. Yang dimana dampak positif nya lebih banyak ketimbang dampak negatifnya seperti, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan tidak akan adanya perpecahan antar kelompok masyarakat yang

disebabkan oleh Pilkades serta membuat masyarakat lebih sejahtera.

2. Berdasarkan pemaparan dari analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) terkait prosedur pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman.
3. Upaya alternatif terhadap hasil analisis pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi adalah Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melakukan pengawalan yang lebih dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Setia Asih ini. Sehingga ketika ada hambatan dapat diatasi dengan cepat dan membuat proses perubahan status desa menjadi kelurahan ini berjalan optimal.

REFERENSI

- Kansil, C. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Organisasi Perubahan Status Menjadi Kelurahan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. 2016. Teknik Analisis SWOT. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Soekanto, Soerjono.2013. Sosiologo Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada

Pemerintah Desa Setia Asih, Pemerintah Kecamatan Tarumajaya, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta informan yang telah memberikan kesempatan dan telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan penelitian dengan memberikan informasi mengenai penelitian ini.